



# Analisis Kesenjangan Digital Tingkat Pertama dan Daya Beli Komunikasi Kelas Sosial di Desa Semplak Barat Kabupaten Bogor

Gilang Tresna Putra Anugrah<sup>1,2\*</sup>, Sofyan Sjaf<sup>2</sup>, Tantan Hermansah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Study program in Fakultas Ekologi Manusia,, IPB University

<sup>2</sup>Fakultas Ekologi Manusia,, IPB University Jl. Raya Dramaga Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[gilangtresnaputra@apps.ipb.ac.id](mailto:gilangtresnaputra@apps.ipb.ac.id); [sofyansjaf@apps.ipb.ac.id](mailto:sofyansjaf@apps.ipb.ac.id); [tantan.hermansah@uinjkt.ac.id](mailto:tantan.hermansah@uinjkt.ac.id)

*Abstract* The digital divide, as a result of the development of the digital age and the 4.0 industrial revolution, has become an important issue even at the international level. Ragnedda attributes the digital divide to an individual's social class as a preceding factor. This article aims to analyze the first-order digital divide that occurs in each social class, as well as consider the purchasing power of communication in West Semplak Village. The method used in writing this article is through secondary data analysis using information contained in the Data Desa Presisi (DDP). The results of this study confirm that: (1) There is a difference in the first-level digital divide, where the order is the middle class with a percentage of 10.00%, followed by the lower class with 7.10%, and the upper class with 1.91%; (2) Judging from the average value of communication costs, the upper class has a cost of Rp232,719, which is greater than the class below; (3) When considering the proportion of communication costs to income in each class, the order of the proportion of communication purchasing power from the largest is the lower class at 9.39%, followed by the middle class with 6.44%, and the upper class with 6.07%.

**Keywords:** *Digital Divide, Cost of Communication, Social Class.*

*Abstrak* Kesenjangan digital, sebagai hasil dari perkembangan era digital dan revolusi industri 4.0, telah menjadi isu yang penting bahkan di tingkat internasional. Ragnedda menghubungkan kesenjangan digital ini dengan kelas sosial individu sebagai faktor yang mendahuluinya. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kesenjangan digital tingkat pertama yang terjadi pada setiap kelas sosial, serta mempertimbangkan daya beli komunikasi di Desa Semplak Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah melalui analisis data sekunder dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam Data Desa Presisi (DDP). Hasil dari penelitian ini mengkonfirmasi bahwa: (1) Terdapat perbedaan kesenjangan digital tingkat pertama, dimana urutannya adalah kelas menengah dengan persentase sebesar 10,00%, diikuti oleh kelas bawah dengan 7,10%, dan kelas atas dengan 1,91%; (2) Dilihat dari nilai rata-rata biaya komunikasi, kelas atas memiliki biaya sebesar Rp232.719, yang lebih besar daripada kelas di bawahnya; (3) Jika diperhatikan proporsi biaya komunikasi terhadap pendapatan di setiap kelas, urutan proporsi daya beli komunikasi dari yang terbesar adalah kelas bawah sebesar 9,39%, diikuti oleh kelas menengah dengan 6,44%, dan kelas atas dengan 6,07%.

**Kata kunci:** Kesenjangan Digital, Biaya Komunikasi, Kelas Sosial.

## I. PENDAHULUAN

Saat ini, dunia telah mengalami serangkaian revolusi industri, yaitu revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 serta akan memasuki revolusi industri 5.0 akan segera terjadi (Fauziyah, 2022). Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan penggunaan listrik untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk otomatisasi industri. Revolusi industri 4.0 ditandai



dengan penggunaan *internet of things* (IoT), *artificial intelligence* (AI), dan *big data* untuk menghubungkan berbagai perangkat dan sistem secara otomatis. Perkembangan ini telah memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi teknologi, ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Pengaruh dari evolusi industri tidak hanya terbatas pada transformasi teknologi, melainkan juga pada perubahan pola konsumsi masyarakatnya. Pada era revolusi industri 4.0, internet menjadi alat utama untuk berkomunikasi, mengakses informasi dan pengetahuan secara global, membantu dalam urusan bisnis, serta menjadi sumber hiburan (Media, 2020).

Di era digital, masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dalam pola konsumsi akses internet di Indonesia. Hasil studi dari Nielson yang membandingkan perilaku akses internet antara tahun 2015 dan 2017 menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2017 dalam hal waktu penggunaan internet, baik di pagi, siang, maupun malam hari, baik saat bekerja maupun berlibur (Febriani & Dewi, 2019). Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya biaya yang dibutuhkan untuk akses internet. Ada berbagai faktor budaya yang memengaruhi cara seseorang mengonsumsi kuota internet, biaya komunikasi, pulsa, atau aspek lain yang mendukung perangkat digital. Salah satu dari faktor budaya tersebut adalah kelas sosial (Setiadi, 2019). Kelas sosial memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi dan perilaku konsumsi daya beli individu (Ayuningtyas, 2022). Teori dari Mangkunegara menyatakan bahwa individu dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki daya beli dan pola konsumsi yang lebih besar dibandingkan dengan individu dari kelas sosial yang lebih rendah (Rasyid, 2019). Perbedaan dalam biaya akses internet atau komunikasi karena perbedaan kelas sosial pertama kali tercermin dalam kesenjangan digital di masyarakat.

Di Indonesia, desa merupakan wilayah yang mendominasi, dengan jumlah sebanyak 74.754 (Arham et al., 2019). Pada tahun 2020, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan lebih banyak, yaitu sebesar 56,7%, sedangkan penduduk yang tinggal di pedesaan sebesar 43,3% (Databoks, 2021). Jumlah penduduk desa yang lebih sedikit dibandingkan penduduk perkotaan berpotensi akan mengalami kesenjangan digital. Meskipun era digital membawa manfaat positif jika dimanfaatkan secara tepat dan optimal untuk kepentingan manusia (Suri, 2019), namun juga membawa dampak negatif (Kurniawan, 2020) termasuk kesenjangan digital. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi digital secara maksimal dapat memberikan dampak positif bagi manusia (Suri 2019), tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif (Kurniawan 2020). Dampak negatif tersebut mencakup kejadian seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks yang meluas di berbagai platform online (Romadhan & Purwandari, 2020), *cancel culture* (Mayasari, 2022), perubahan pola komunikasi di kalangan masyarakat desa (Hadiyanto et al., 2022), an sebagainya.

Isu sosial, terutama kesenjangan digital, telah menjadi perbincangan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Menjelang akhir tahun 2020, International Telecommunication Union (ITU) memperkirakan bahwa ada sekitar 2,9 miliar orang yang masih belum memiliki akses internet (Jayanthi & Dinaseviani, 2022). Kekurangan akses internet menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kesenjangan digital. Biasanya, kesenjangan ini lebih terasa di daerah pedesaan (Hamzah & Yohanda, 2022). Mayoritas wilayah Indonesia yang terdiri dari pedesaan (Kusumawarta & Sjaf, 2018) menjadi sumber daya sekaligus potensi kerawanan bagi negara ini. Ketidakmampuan akses digital di banyak pedesaan Indonesia dapat berdampak signifikan bagi negara secara keseluruhan.

Pada zaman digital, kesenjangan digital memiliki potensi untuk menghasilkan ulang kemiskinan dalam konteks era digital (Ragnedda, 2017). Stiglitz juga mengemukakan bahwa keberadaan kemiskinan saat ini salah satu akibat dari kesenjangan digital (Mazya, 2021). Kesenjangan digital bisa terjadi pada tingkat individu, kelompok, komunitas, bahkan di tingkat negara, yang terkait dengan kemampuan mereka dalam mengakses dan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis internet (Oktavianoor, 2020). Ketidaksetaraan akses terhadap perangkat digital dapat terjadi di antara kelompok-kelompok tertentu, memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok sehingga menciptakan ketimpangan dalam nilai yang diperoleh oleh kelompok tersebut dalam kehidupan mereka (Heeks, 2022).

Istilah "kesenjangan digital" pertama kali muncul pada tahun 1990an (Heeks, 2022) dan merujuk pada fenomena di mana teknologi menentukan perbedaan antara kelompok yang memiliki akses pada bentuk baru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan kelompok yang tidak memiliki akses (Ajrung, 2023; Law et al., 2022; Mabwezara, 2021). Dalam paradigma Manichean, kesenjangan ini dikonseptualisasikan sebagai dualisme antara "mereka yang memiliki" dan "mereka yang tidak memiliki" (Heeks, 2022). Akibatnya, kesenjangan digital menjadi perhatian utama yang perlu dipelajari dalam konteks geografis tertentu, menjadi tanggung jawab moral bagi para pengambil kebijakan dalam menjalankan tugas mereka (Lembani et al., 2020; Otioma et al., 2019). Hal ini menegaskan bahwa stratifikasi sosial (seperti pendidikan, pekerjaan, ras, usia,



pendapatan, modal, dan sebagainya) menjadi faktor yang mencetuskan atau menjadi pemicu utama kesenjangan digital (Faloye & Ajayi, 2022; Hargittai et al., 2019; Martínez-Domínguez & Mora-Rivera, 2020).

Salah satu model terkemuka dalam memahami kesenjangan digital diperkenalkan oleh Van Dijk, di mana ia mengelompokkan kesenjangan tersebut menjadi 4 kategori akses: akses motivasional, akses material, akses keterampilan, dan akses penggunaan (Dijk, 2005). Kesenjangan digital memiliki tiga tipe, salah satunya adalah kesenjangan digital tingkat pertama. Kesenjangan digital tingkat pertama berkaitan dengan akses atau kepemilikan terhadap perangkat TIK (Calderón Gómez, 2019) atau yang biasa disebut sebagai akses material. Kesenjangan digital pada tingkat pertama masih menjadi fokus penting terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan akses internet, tetapi juga kepemilikan perangkat digital seperti ponsel pintar atau hp, laptop, dan perangkat lainnya. Perbedaan dalam strata sosial menjadi penyebab atau pemicu kesenjangan pada akses material tersebut.

Kelas sosial sering dikategorikan berdasarkan kondisi ekonomi yang didasarkan pada aset, pendapatan, serta sumber daya yang dimiliki oleh individu. Pendekatan ini juga diterapkan oleh National Socio-Economic Classification (NS-SEC), yang mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas berdasarkan tingkat pendapatan, yakni tinggi, menengah, dan rendah (Gagné & Brown, 2021). Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki pengukuran sendiri dalam klasifikasi pendapatan, membagi individu ke dalam kelas atas, menengah, atau bawah dengan rentang pendapatan tertentu (Rakasiwi & Kautsar, 2021): (1) kategori pendapatan sangat tinggi dengan rata-rata lebih dari Rp3.500.000,00 per bulan; (2) kategori pendapatan tinggi dengan rata-rata pendapatan Rp2.500.000,00-Rp3.500.000,00 per bulan; (3) kategori pendapatan sedang dengan rata-rata pendapatan Rp1.500.000,00-Rp2.500.000,00 per bulan; (4) kategori pendapatan rendah dengan rata-rata pendapatan kurang dari Rp1.500.000,00 per bulan. Dalam menentukan pendapatan seseorang, terkadang estimasi angka tersebut didasarkan pada pengeluaran, suatu pendekatan yang juga digunakan oleh BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Wahyudi & Wahyudin, 2022).

Kemajuan teknologi dapat menjadi alat bagi desa untuk meningkatkan sektor pertanian secara lebih adil (Sjaf, Arsyad, et al., 2022) sehingga desa-desa yang tertinggal dalam hal kesenjangan digital perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama bagi para petani. Ada perubahan yang terjadi dalam perkembangan desa-desa yang berada di pinggiran atau berdekatan dengan wilayah perkotaan yang menghasilkan keragaman atau ciri khas gabungan antara suasana desa dan kota, dikenal sebagai semi urban (Hapsari & Aulia, 2019; Jayanti & Jamil, 2020; Rosyidi & Aulia, 2020). Salah satu desa yang membutuhkan menarik untuk dikaji karena berlokasi dekat dengan kampus dan tergolong desa semi urban adalah Desa Semplak Barat. Perubahan ini juga mengakibatkan variasi ekonomi, termasuk perubahan dalam pendapatan dan jenis pekerjaan serta perbedaan kelas sosial di desa-desa yang berbatasan dengan kota. Desa Semplak Barat dipilih juga karena presentase kelas sosial berdasarkan kriteria pendapatan BPS dapat ditemukan dalam Data Desa Presisi pada kelas bawah presentasinya 24,53% dan termasuk angka yang besar dibandingkan desa lainnya.

Kesenjangan digital tingkat pertama diduga berkaitan dengan perbedaan kelas sosial, yang kemudian juga mengakibatkan disparitas dalam kemampuan membeli komunikasi, kuota, atau layanan sejenis yang mendukung penggunaan perangkat digital. Hal ini menarik perhatian karena masih menjadi topik hangat dalam diskusi, terutama di tingkat desa yang belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan digital tingkat pertama di berbagai kelas sosial serta biaya komunikasi atau internet yang ada di Desa Semplak Barat, Kabupaten Bogor.

## II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Menurut Heaton, analisis data sekunder adalah sebuah pendekatan riset yang memanfaatkan data kualitatif atau kuantitatif yang telah ada sebelumnya, digunakan untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian sebelumnya (Aswin et al., 2022). Metode ini tidak memerlukan pengumpulan data baru melalui survei, wawancara, observasi, atau pengujian (Darmawan & Cristiani, 2021). Analisis data sekunder memiliki beberapa tujuan, di antaranya, yaitu menerapkan permasalahan baru dari penelitian sebelumnya, menghasilkan ide-ide baru dari data yang ada, melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sebelumnya, serta mengeksplorasi data dari perspektif yang berbeda (Darmawan & Cristiani, 2021). Data sekunder ini diperoleh dari sumber Data Desa Presisi (DDP).

DDP merupakan kumpulan data yang sangat akurat dan tepat dalam memberikan gambaran yang aktual mengenai keadaan desa dan dengan tepat menunjukkan subjek berdasarkan nama, alamat, dan koordinat (Arsyad, Sjaf, Hakim, et al., 2021). DDP merangkum metode pengumpulan data desa yang menggabungkan



pendekatan sensus, spasial, dan partisipasi masyarakat dengan unit analisis yang fokus pada keluarga dan individu (Sjaf, Sampean, et al., 2022). Data yang dihasilkan oleh DDP dapat memperlihatkan berbagai aspek kesejahteraan rakyat, seperti sandang, pangan, dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia; serta infrastruktur dan lingkungan (Sjaf, Sampean, et al., 2022).

Pengambilan data sekunder dari DDP dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni: pertama, data yang terdapat di DDP mengenai setiap individu di Desa Semplak Barat sudah komprehensif karena dikumpulkan melalui sensus; kedua, data mengenai kesenjangan digital tingkat pertama di Desa Semplak Barat telah ada; dan ketiga, informasi tentang pengeluaran masing-masing penduduk di Desa Semplak Barat juga sudah tersedia. Karenanya, data tersebut sudah lengkap, dapat digunakan, dan mudah diakses. Ketersediaan data ini tentang kelas sosial dan kesenjangan digital memudahkan jalannya penelitian ini karena tidak memerlukan pengumpulan data langsung di lapangan dan mengoptimalkan penggunaan waktu.

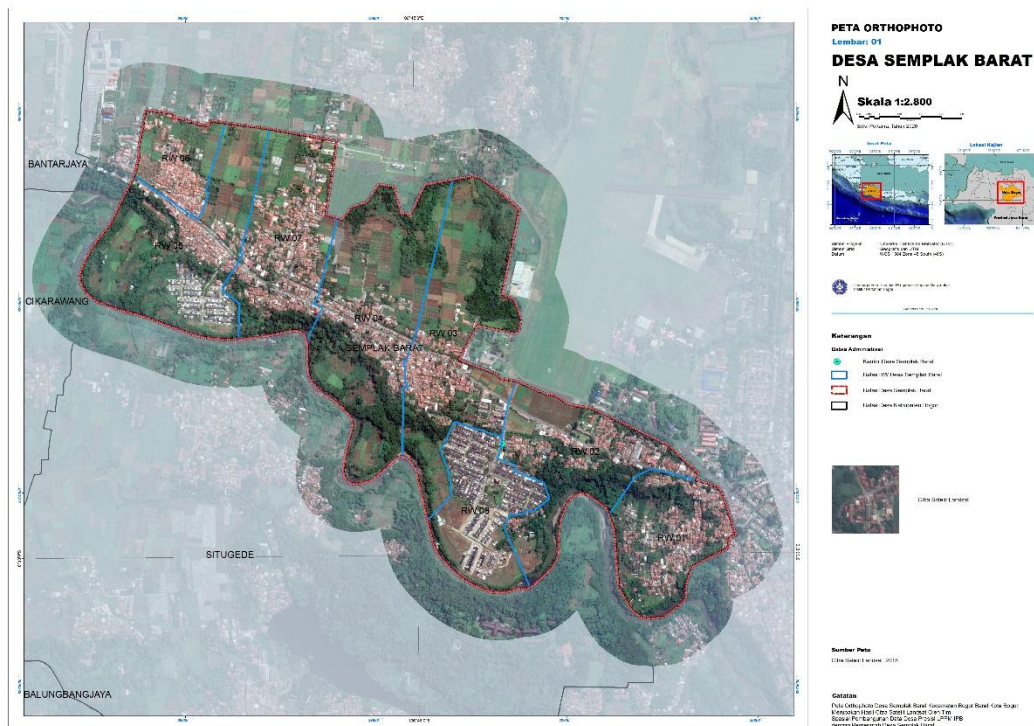
### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Desa Semplak Barat

Desa Semplak Barat berkolasi di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Jika dilihat dari administrasinya, Desa Semplak Barat secara administratif, berlokasi di bagian timur, berbatasan dengan Desa Semplak; di bagian barat, berbatasan dengan Desa Bantarjaya; di bagian utara, berbatasan dengan Desa Bojong; dan di bagian selatan, berbatasan dengan Desa Situ Gede. Desa ini terbagi menjadi delapan wilayah administratif yang disebut rukun warga. Melalui pemetaan spasial berdasarkan Data Desa Presisi dari bulan September hingga Desember 2020, luas wilayah Desa Semplak Barat adalah sekitar 130,53 hektar. Dapat dilihat gambar 1 merupakan peta orthophoto dari Desa Semplak Barat.

Menurut data sensus yang mencakup sekitar 85,92% dari keseluruhan titik pada Peta Kerja, Desa Semplak Barat memiliki jumlah kepala keluarga mencapai 1.830 KK, dengan total populasi sekitar 6.542 orang. Data Piramida Penduduk Desa Semplak Barat menunjukkan bahwa sebanyak 4.531 orang berada dalam rentang usia produktif, sementara sisanya, sebanyak 2.011 orang, masuk dalam kategori usia non-produktif. Analisis dari grafik menunjukkan bahwa jumlah usia produktif tertinggi berada di RW 07, yaitu sekitar 1.064 orang, sedangkan jumlah terendah berada di RW 02, sekitar 149 orang.

**Gambar 1. Peta orthophoto Desa Semplak Barat**

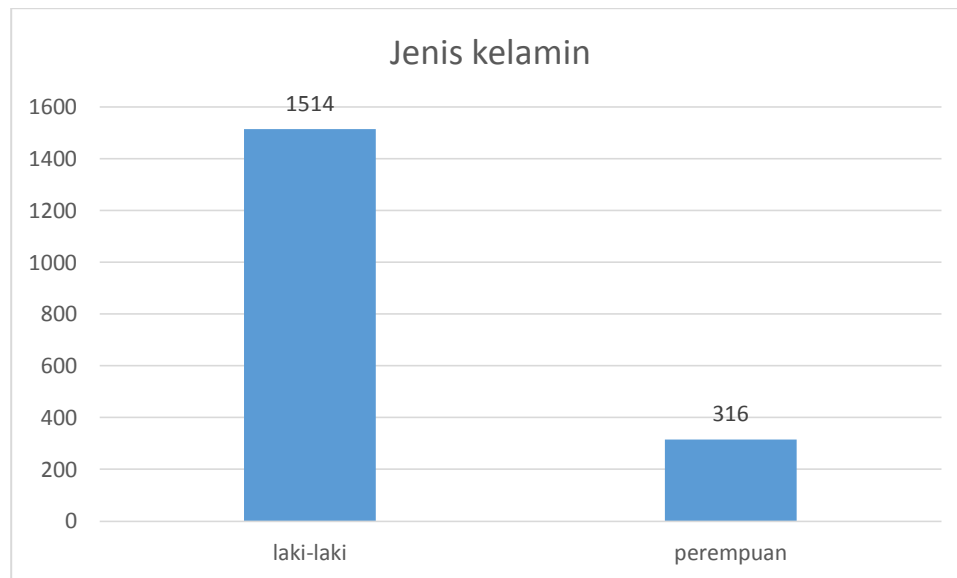


Sumber: Data Desa Presisi

### Demografi Penduduk Desa Semplak Barat

Desa Semplak Barat seperti pada diagram 1 menunjukkan kepala keluarga didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 82,73% atau 1.514 jiwa, sedangkan persentase penduduk perempuan sebesar 17,26% atau 316 jiwa. Total kepala keluarga tersebut di Desa Semplak Barat berjumlah 1.830 KK. Hal ini menunjukkan bahwa rasio gender kepala keluarga tersebut bernilai 4.79. Rasio gender tersebut menunjukkan bahwa pada 1 kepala keluarga perempuan, terdapat pula 4-5 kepala keluarga laki-laki. Analisis tersebut dapat memberikan gambaran mengenai komposisi kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin di Desa Semplak Barat.

**Diagram 1. Jumlah laki-laki dan perempuan berdasarkan statusnya sebagai kepala keluarga di Desa Semplak Barat**

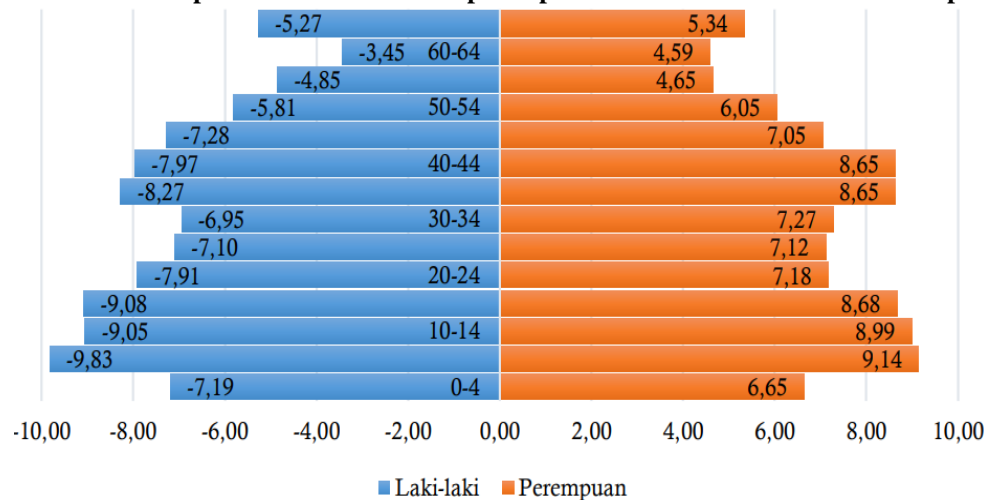


Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

Pada diagram 2 terlihat piramida penduduk Desa Semplak Barat tergolong kedalam piramida stasioner. Piramida stasioner tersebut menunjukkan beberapa indikasi di antaranya: (1) Desa Semplak Barat jumlah dari penduduk muda, dewasa, dan tua relatif sama walaupun lebih banyak penduduk dewasa dan produktif sehingga usia yang tergolong produktif ini mampu dioptimalkan potensinya dalam pembangunan Desa Semplak Barat, (2) perubahan struktur usia yang hamper seimbang itu menunjukkan bahwa fertilitas hamper sama dengan mortalitas penduduk, (3) usia harapan hidup relatif tinggi sehingga memiliki dua kemungkinan, pertama jika mayoritas penduduknya sehat akan membawa dampak positif bagi desa, kedua jika mayoritas penduduknya sering sakit akan memberikan dampak buruk bagi desa, (4) memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, (5) rasio ketergantungannya hampir nol.

Jumlah individu dalam usia produktif di Desa Semplak Barat mencapai 4.566 orang, sedangkan individu yang belum atau tidak produktif berjumlah 1.976 orang. Oleh karena itu, rasio beban tanggungan di desa tersebut adalah 43,27. Artinya, setiap 100 orang usia produktif bertanggung jawab terhadap 43 orang yang belum atau tidak produktif. Rasio 43,27 juga menunjukkan bahwa Desa Semplak Barat telah memasuki periode bonus demografi. Penting untuk memanfaatkan bonus demografi ini secara efektif, karena hal ini dapat meningkatkan perekonomian desa, memperkuat produktivitas dengan kehadiran jumlah besar individu usia produktif, serta mendorong perubahan sosial dan peningkatan dalam sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, bonus demografi juga dapat menjadi bencana jika tidak dimanfaatkan dengan baik; hal ini dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang menjadi beban pembangunan, peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan dan sosial di masa depan, serta rendahnya pendapatan per kapita.

Diagram 2. Piramida penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan usia di Desa Semplak Barat



Sumber: (Arsyad, Sjaf, Gandi, et al., 2021)

### Kelas Sosial, Pekerjaan, dan Kesenjangan Digital

Desa Semplak Barat yang memiliki kepala keluarga berjumlah 1.830 KK. Jumlah KK tersebut ketika diolah dan dianalisis dengan ukuran pendapatan yang ditetapkan oleh BPS dengan diproksikan menggunakan pengeluaran masing-masing kepala keluarga pada aspek pendidikan, infrastruktur, kehidupan sosial perlindungan hukum dan HAM, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, sandang pangan, dan papan yang terdapat di DDP. Hasil olahan tersebut disajikan dalam diagram 3 dengan kepala keluarga yang tergolong kelas atas berjumlah 570 kepala keluarga, kepala keluarga yang tergolong kelas menengah berjumlah 811, dan kepala keluarga yang tergolong kelas bawah berjumlah 449 kepala keluarga. Berdasarkan penyajian data tersebut diketahui bahwa mayoritas kepala keluarga di Desa Semplak Barat masih tergolong kedalam kelas menengah yaitu sebesar 44,31%, sedangkan kelas bawah menjadi minoritas yaitu sebesar 24,53%. Hal itu menandakan pembangunan desa dalam tahap yang cukup bagus dengan mayoritas orang berada di kelas menengah dan minoritas orang berada di kelas bawah.

Diagram 3. Klasifikasi Kelas Sosial di Desa Semplak Barat



Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

Penduduk Desa Semplak Barat dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.830 dan digolongkan kedalam tiap-tiap kelas sosial itu dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan pekerjaannya masing-masing di mana dapat dilihat pada diagram 4. Pada kelas atas terbagi kedalam 12 jenis pekerjaan yang berbeda, pada kelas menengah terbagi kedalam 12 jenis pekerjaan yang berbeda, dan pada kelas bawah terbagi kedalam 11 jenis pekerjaan yang berbeda.

Pada kelas atas komposisi jenis pekerjaan dibagi menjadi 12, yaitu tidak bekerja sebesar 7,37%, pensiun sebesar 2,63%, pekerja harian lepas sebesar 16,84%, pegawai tetap lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 9,47%, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebesar 0,18%, pegawai outsourcing di swasta/BUMN/BUMS sebesar 0,35%, pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 6,67%, pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,18%, pegawai lembaga negara dengan kontrak pekerjaan sebesar 5,44%, pegawai kontrak lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 23,51%, mengurus rumah tangga sebesar 4,56%, dan berusaha sendiri sebesar 22,81%. Oleh karena itu jenis pekerjaan paling banyak pada kelas atas yaitu pegawai kontrak lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 23,51%, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,18% .

Pada kelas menengah komposisi jenis pekerjaan dibagi menjadi 11, yaitu tidak bekerja sebesar 8,26%, pensiun sebesar 4,56%, pekerja harian lepas sebesar 30,70%, pegawai tetap lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 3,08%, pegawai outsourcing di swasta/BUMN/BUMS sebesar 0,74%, pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 2,10%, pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,25%, pegawai lembaga negara dengan kontrak pekerjaan sebesar 1,73%, pegawai kontrak lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 13,44%, mengurus rumah tangga sebesar 11,96%, dan berusaha sendiri sebesar 27,18%. Oleh karena itu jenis pekerjaan paling banyak pada kelas menengah yaitu pekerja harian lepas sebesar 30,70%, dan jenis pekerjaan paling sedikit pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,25%.

Pada kelas bawah komposisi jenis pekerjaan dibagi menjadi 12, yaitu tidak bekerja sebesar 14,03%, pensiun sebesar 3,56%, pelajar/mahasiswa sebesar 0,22%, pekerja harian lepas sebesar 28,95%, pegawai tetap lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 3,56%, pegawai outsourcing di swasta/BUMN/BUMS sebesar 0,67%, pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 1,11%, pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,22%, pegawai lembaga negara dengan kontrak pekerjaan sebesar 0,89%, pegawai kontrak lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 9,13%, mengurus rumah tangga sebesar 20,04%, dan berusaha sendiri sebesar 17,59%. Oleh karena itu jenis pekerjaan paling banyak pada kelas bawah yaitu pekerja harian lepas sebesar 28,95%, dan pelajar/mahasiswa dan pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,22% .

Kesenjangan yang didasarkan pada apa yang “dimiliki” dan apa yang “tidak dimiliki”, terkait dengan perbedaan ekonomi seseorang (Mabweazara, 2021). Konsep kesenjangan digital juga mengindikasikan hal serupa, yang mencerminkan perbedaan yang signifikan dan terus-menerus dalam kondisi sosial dan ekonomi individu (Mutsvairo & Ragnedda, 2019). Kesenjangan digital tingkat pertama lebih sering terjadi di negara-negara sedang berkembang. Kesenjangan digital pada tingkat pertama terutama terkait dengan akses material, yang mencakup kepemilikan perangkat digital seperti ponsel, *smartphone*, laptop, dan lainnya.

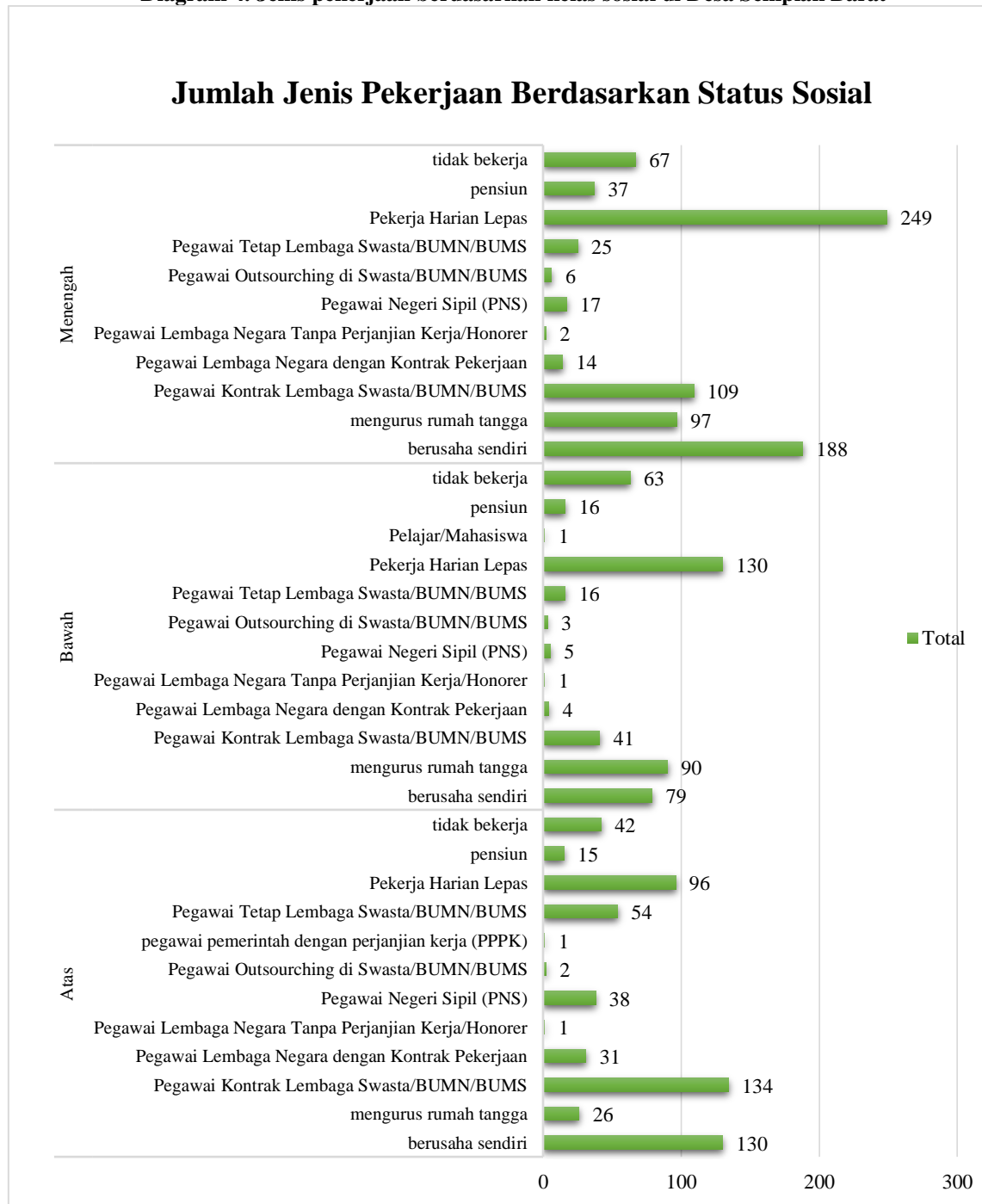
Di Desa Semplak Barat, setelah melakukan pemetaan sosial berdasarkan kelas (atas, menengah, dan bawah), dilakukan pemetaan dan analisis kesenjangan digital di setiap kelas sosial. Tabel 1 memperlihatkan pola kepemilikan perangkat digital yang menjadi penanda kesenjangan digital tingkat pertama di setiap kelas. Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan proporsi kesenjangan digital tingkat pertama di setiap kelas sosial. Dalam kelas atas, terdapat 35 orang atau 1,91% yang tidak memiliki ponsel, sementara 535 orang atau 29,23% yang memiliki. Kelas menengah sebanyak 183 orang atau 10,00% yang tidak memiliki ponsel, dan 628 orang atau 34,32% yang memiliki ponsel. Di kelas bawah, terdapat 130 orang atau 7,10% yang tidak memiliki ponsel, dan 319 orang atau 17,43% yang memiliki ponsel. Data ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital tingkat pertama juga dapat terjadi di kelas atas.

Kesenjangan digital pada tingkat pertama, dari yang terbesar hingga yang terkecil berdasarkan persentase dan jumlah data yang ada, dapat dipetakan dalam urutan kelas menengah, kelas bawah, dan kemudian kelas atas. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital tingkat pertama masih terkait dengan pendapatan atau kondisi ekonomi individu. Kelas bawah, dengan kekuatan ekonomi yang paling rendah, mengalami kesenjangan digital tingkat pertama walau bukan berada di urutan terbawah, sementara kesenjangan terparah dialami oleh kelas sosial menengah, meskipun memiliki posisi ekonomi di tengah-tengah. Di sisi lain, kelas atas, yang memiliki kekuatan ekonomi paling tinggi, mengalami kesenjangan digital tingkat pertama yang paling kecil. Dari data ini, dapat



disimpulkan bahwa tingkat ekonomi seseorang masih sangat berhubungan dengan kesenjangan digital tingkat pertama yang mereka alami.

**Diagram 4. Jenis pekerjaan berdasarkan kelas sosial di Desa Semplak Barat**



Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

Setiap individu di desa, terutama mereka yang termasuk dalam kelas bawah, seharusnya memiliki akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan posisi sosial

mereka. Kelemahan dalam penguasaan teknologi, seperti yang terjadi di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengakibatkan petani berada dalam kelas bawah dan mengalami kerugian akibat dominasi para tengkulak (Sjaf, Arsyad, et al., 2022). Mayoritas penduduk desa yang bergantung pada pertanian dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan kemitraan 4.0 di platform digital. Hal ini memungkinkan mereka untuk bermitra dengan petani lain, instansi pemerintah, perusahaan swasta, serta masyarakat secara adil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara merata (Sjaf, Arsyad, et al., 2022).

**Tabel 1. Persentase jumlah *handphone/smartphone* yang dimiliki berdasarkan kelas sosial**

Kelas Sosial	Desa Semplak Barat (%)
<b>Atas</b>	
memiliki ponsel	29,23%
tidak memiliki ponsel	1,91%
<b>Menengah</b>	
memiliki ponsel	34,32%
tidak memiliki ponsel	10,00%
<b>Bawah</b>	
memiliki ponsel	17,43%
tidak memiliki ponsel	7,10%

Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

### Pendapatan dan Biaya Komunikasi Kelas Sosial

Setiap kelas sosial memiliki rata-rata pendapatan yang berbeda. Berdasarkan data jumlah orang yang tidak mengalami kesenjangan digital tingkat pertama di setiap kelas didapatkan rata-rata pendapatan kelas atas yang jumlahnya 535 orang dengan rata-rata Rp3.597.776 perbulan, kemudian kelas menengah yang jumlahnya 628 orang dengan rata-rata Rp1.998.520 perbulan, dan kelas bawah yang jumlahnya 319 orang dengan rata-rata Rp1.063.362 perbulan seperti pada tabel 2. Kelas atas yang tidak mengalami kesenjangan digital tingkat pertama memiliki rentang penghasilan dari Rp2.501.667 hingga Rp24.583.333. Kelas menengah yang tidak mengalami kesenjangan digital tingkat pertama memiliki rentang penghasilan dari Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000. Kelas bawah yang tidak mengalami kesenjangan digital tingkat pertama memiliki rentang penghasilan dari Rp507.500 hingga Rp1.498.333.

Berdasarkan data memang terbukti bahwa perilaku konsumen kelas atas untuk membiayai kebutuhan internet atau komunikasi *handphone*-nya memiliki daya beli yang lebih besar dibandingkan kelas sosial di bawahnya. Kelas bawah memiliki pengeluaran untuk biaya komunikasi antara Rp10.000 hingga Rp400.000 perbulan dengan rata-rata biaya untuk komunikasi sebesar Rp111.602 perbulan. Kelas menengah memiliki pengeluaran untuk biaya komunikasi antara Rp10.000 hingga Rp500.000 perbulan dengan rata-rata biaya untuk komunikasi sebesar Rp137.713 perbulan. Kelas atas memiliki pengeluaran untuk biaya komunikasi antara Rp15.000 hingga Rp900.000 perbulan dengan rata-rata biaya untuk komunikasi sebesar Rp232.719 perbulan. Hal itu cukup menjadi bukti bahwa pengeluaran kelas atas untuk biaya komunikasi lebih besar dari kelas di bawahnya walaupun pada rentang minimalnya memiliki nominal yang tidak berbeda jauh.

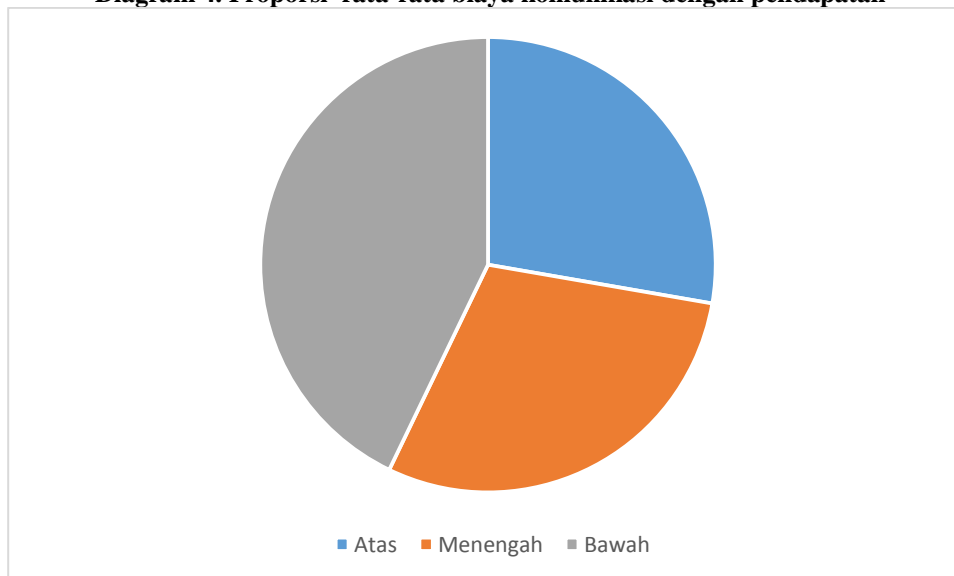
**Tabel 2. Rata-rata pendapatan dan biaya komunikasi setiap kelas sosial**

Kelas sosial	Rata-rata biaya komunikasi perbulan (Rp)	Rata-rata pendapatan perbulan (Rp)
<b>Atas</b>	232.719	3.597.776
<b>Menengah</b>	137.713	1.998.520
<b>Bawah</b>	111.602	1.076.865

Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

Pada tabel 2 memang telah membuktikan secara nominal bahwa kelas atas memiliki daya beli yang lebih besar dibandingkan kelas di bawahnya dalam hal biaya komunikasi. Pada diagram 4 dipaparkan data yang berbeda dengan mengubah data yang berbasis nominal menjadi proporsi rata-rata biaya komunikasi dengan pendapatan. Diagram 4 menunjukkan komposisi yang seimbang pada biaya komunikasi jika dibandingkan dengan pendapatan pada setiap kelas sosial. Setiap kelas sosial memiliki persentase rata-rata di angka 7,3% dengan rincian kelas atas 6,07%, kelas menengah 6,44%, dan kelas bawah 9,39%. Data tersebut menjadi bukti bahwa jika mengganti cara melihatnya dari berdasarkan nominal menjadi berdasarkan proporsi biaya komunikasi terhadap pendapatan maka akan didapatkan hasil bahwa kelas bawah memiliki proporsi paling besar dalam daya beli konsumsi internet atau komunikasi.

**Diagram 4. Proporsi rata-rata biaya komunikasi dengan pendapatan**



Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

## VI. KESIMPULAN

Kesenjangan digital tingkat pertama masih ada di Desa Semplak Barat, di mana kelas menengah, kelas bawah, dan kelas atas memiliki tingkat kesenjangan digital dari yang paling tinggi hingga terendah. Hal ini menandakan bahwa kesenjangan digital tingkat pertama masih dipengaruhi oleh strata sosial masyarakat. Selain itu, mereka yang tidak mengalami kesenjangan digital tingkat pertama harus mampu membeli biaya komunikasi atau internet untuk menjaga kinerja perangkat mereka. Teori Mangkunegara yang menyatakan bahwa kelas atas memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan kelas bawah terbukti jika mengacu pada rata-rata biaya komunikasi di setiap kelas; kelas atas menghabiskan Rp232.719, kelas menengah Rp137.713, dan kelas bawah Rp111.602. Namun, ketika mempertimbangkan proporsi biaya komunikasi terhadap pendapatan setiap kelas, kelas bawah justru memiliki daya beli terbesar di mana persentasenya 9,39%. Hal ini menunjukkan bahwa teori Mangkunegara tidak sepenuhnya tepat. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada satu desa, sehingga perbandingan dengan desa-desa lain di Indonesia perlu dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti dan hipotesis yang dihasilkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan data yang sangat berharga, terutama kepada Merdesa Riset Indonesia (MRI). Penulis juga berterima kasih kepada anggota lain yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk menyempurnakan artikel ini.

## REFERENCES

- [1] Ajrun, N. (2023). Bridging the Digital Divide Affecting Persons with Disabilities in Malaysia. *International Journal of Disability, Development and Education*, 70(4), 562–574. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2021.1901860>
- [2] Arham, I., Sjaif, S., & Darusman, D. (2019). Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17, No 2 (2019), 245–255. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.245-255>



- [3] Arsyad, A. A., Sjaf, S., Gandi, R., Maulana, R., Wijayanta, I. M. P., Gunada, R. R., & Alfiyasin, T. A. (2021). Membangun Data Desa Presisi di Desa Semplak Barat, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 3(1), Article 1.
- [4] Arsyad, A. A., Sjaf, S., Hakim, L., Salsabila, J., Putri, S. P., Maulidya, S. E., Mustakiman, M., & Vayumi, M. N. (2021). Membangun Data Desa Presisi di Desa Bantarjaya, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 3(1), Article 1.
- [5] Aswin, A. dd, Ramadhan, A., Ludmuti, B. S., Romawan, D., & Kurniawan, M. A. (2022). Keberlangsungan Bisnis Pada Umkm Di Tengah Pandemi Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 2(1), Article 1.
- [6] Ayuningtyas, F. (2022). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Komunikasi*. CV. Mitra Cendekia Media.
- [7] Calderón Gómez, D. (2019). Technological capital and digital divide among young people: An intersectional approach. *Journal of Youth Studies*, 22(7), 941–958. <https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1559283>
- [8] Darmawan, B., & Cristiani, C. (2021). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. *JURNAL MEDIA ADMINISTRASI*, 3(1), Article 1.
- [9] Databoks. (2021). *Sebanyak 56,7% Penduduk Indonesia Tinggal di Perkotaan pada 2020* | Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/sebanyak-567-penduduk-indonesia-tinggal-di-perkotaan-pada-2020>
- [10] Dijk, J. A. G. M. van. (2005). *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*. SAGE Publications.
- [11] Faloye, S. T., & Ajayi, N. (2022). Understanding the impact of the digital divide on South African students in higher educational institutions. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 14(7), 1734–1744. <https://doi.org/10.1080/20421338.2021.1983118>
- [12] Fauziyah, R. N. (2022, September 16). *Perjalanan Revolusi Industri 1.0 Hingga 5.0*. Best Seller Gramedia. <https://gramedia.com/best-seller/perjalanan-revolusi-industri-1-0-hingga-5-0/>
- [13] Febriani, N., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku Konsumen di Era Digital: Beserta Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- [14] Gagné, T., & Brown, J. (2021). Socio-economic distribution of e-cigarette use among recent former regular smokers and current smokers at ages 25–26 in England. *Addiction*, 116(6), 1548–1557. <https://doi.org/10.1111/add.15345>
- [15] Hadiyanto, D., Mulyana, A., & Nuryana, N. (2022). Budaya Komunikasi Masyarakat Desa di Era Industri 4.0: Studi Kasus Desa Astanamukti Kabupaten Cirebon. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v17i2.1880>
- [16] Hamzah, H., & Yohanda, R. (2022). Problematika Orang Tua Dalam Mengajar Anak Di Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.55583/jkip.v2i2.249>
- [17] Hapsari, A. D., & Aulia, B. U. (2019). Tipologi Wilayah Peri Urban Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Aspek Fisik, Sosial, dan Ekonomi. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2), C168–C172. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.34248>
- [18] Hargitai, E., Piper, A. M., & Morris, M. R. (2019). From internet access to internet skills: Digital inequality among older adults. *Universal Access in the Information Society*, 18(4), 881–890. <https://doi.org/10.1007/s10209-018-0617-5>
- [19] Heeks, R. (2022). Digital inequality beyond the digital divide: Conceptualizing adverse digital incorporation in the global South. *Information Technology for Development*, 28(4), 688–704. <https://doi.org/10.1080/02681102.2022.2068492>
- [20] Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 24(2), Article 2. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>
- [21] Jayanti, M. A., & Jamil, A. M. M. (2020). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Kolaboratif Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Wilayah Peri Urban Kota Malang. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21067/jpig.v5i1.3852>
- [22] Kurniawan, A. R. (2020). Tantangan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Pada Era Digital Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Pangalengan). *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24198/tornare.v2i2.25418>
- [23] Kusumawarta, E. P., & Sjaf, S. (2018). Pengorganisasian Komunitas oleh Inovator Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.6.731-744>
- [24] Law, E. L.-C., Vostanis, P., & O'Reilly, M. J. (2022). Insights from impacts of the digital divide on children in five majority world countries during the COVID-19 pandemic. *Behaviour & Information Technology*, 0(0), 1–20. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2141136>
- [25] Lembani, R., Gunter, A., Breines, M., & Dalu, M. T. B. (2020). The same course, different access: The digital divide between urban and rural distance education students in South Africa. *Journal of Geography in Higher Education*, 44(1), 70–84. <https://doi.org/10.1080/03098265.2019.1694876>
- [26] Mabweazara, H. M. (2021). Towards reimagining the ‘digital divide’: Impediments and circumnavigation practices in the appropriation of the mobile phone by African journalists. *Information, Communication & Society*, 24(3), 344–364. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1834602>
- [27] Martínez-Domínguez, M., & Mora-Rivera, J. (2020). Internet adoption and usage patterns in rural Mexico. *Technology in Society*, 60, 101226. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101226>
- [28] Mayasari, F. (2022). Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial. *Journal of Communication and Society*, 1(01), Article 01. <https://doi.org/10.55985/jocs.v1i01.15>
- [29] Mazya, T. M. (2021). Transformasi dan Kesejahteraan Desa Digital; Telaah Perbandingan Komunitas Desa Pesisir dan Desa Dataran Tinggi di Kabupaten Banyuwangi. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/112391>
- [30] Media, K. C. (2020). 5 Manfaat Internet. *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/08/224859069/5-manfaat-internet>
- [31] Mutsvairo, B., & Ragnedda, M. (2019). Mapping the Digital Divide in Africa: A Mediated Analysis. <https://doi.org/10.5117/9789462986855>
- [32] Oktavianoor, R. (2020). Kesenjangan Digital Akibat Kondisi Demografis di Kalangan Masyarakat Rural. *Journal of Information and Library Science*, 11(1).
- [33] Otioma, C., Madureira, A. M., & Martinez, J. (2019). Spatial analysis of urban digital divide in Kigali, Rwanda. *GeoJournal*, 84(3), 719–741. <https://doi.org/10.1007/s10708-018-9882-3>
- [34] Ragnedda, M. (2017). *The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities (1st edition)*. Routledge.



- [35] Rakasiwi, L. S., & Kautsar, A. (2021). Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31685/kek.v5i2.1008>
- [36] Rasyid, A. (2019). Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i2.2128>
- [37] Romadhan, A. N., & Purwandari, E. (2020). Peran sanggar regoling ma'rifat dalam penanaman karakter pada anak di era digital. *Indigenus: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.23917/indigenus.v5i1.11144>
- [38] Rosyidi, A. Z., & Aulia, B. U. (2020). Pola Keterkaitan Kota-Desa dari Segi Pergerakan Orang Antara Kota Mojokerto dengan Wilayah Peri Urban di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2), C96–C101. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.48393>
- [39] Setiadi, N. J. (2019). Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen Edisi Ketiga. Prenada Media.
- [40] Sjaf, S., Arsyad, A. A., Mahardika, A. R., Gandi, R., Elson, L., Hakim, L., Barlan, Z. A., Utami, R. B., Muhammad, B., Amongjati, S. A., Sampean, & Nugroho, D. A. (2022). Partnership 4.0: Smallholder farmer partnership solutions. *Heliyon*, 8(12), e12012. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12012>
- [41] Sjaf, S., Sampean, Arsyad, A. A., Elson, L., Mahardika, A. R., Hakim, L., Amongjati, S. A., Gandi, R., Barlan, Z. A., Aditya, I. M. G., Maulana, S. A. B., & Rangkuti, M. R. (2022). Data Desa Presisi: A new method of rural data collection. *MethodsX*, 9, 101868. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101868>
- [42] Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.46937/17201926848>
- [43] Wahyudi, M. R., & Wahyudin, W. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2016–2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), Article 1. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1409>